

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada era reformasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah adalah awal dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah membuat tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar, dikarenakan harus mengelolah sendiri sumber daya daerahnya yang ada dengan lebih efisien dan efektif.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya kedalam belanja-belanja dengan menganut kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pada era otonomi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu menggali sumber pembiayaan lokal dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan aktual dari daerahnya masing-masing. Dengan demikian, penyerahan desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan pengelolaan finansial yang baik oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Seluruh pendapatan tersebut harus dikelola dengan baik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

Selain mengelola sumber dana tersebut dengan baik, pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan keuangan daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah. Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara/masyarakat merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam bentuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) No.1 yang merupakan standar penyajian laporan keuangan di sektor publik (International Public Sector Accounting Standard Board, 2006) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merepresentasikan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas sektor publik. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Kinerja fiskal pemerintah daerah akan dapat diukur ketika pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerah yang akuntabel.

Halim dan Kusufi (2014), mendefinisikan kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat terlihat dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan indikator penting dalam menjalankan otonomi daerah yaitu berupa kekayaan daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat serta kemandirian keuangan pemerintah daerah. Indikator pertama yang dapat menggambarkan kinerja fiskal atau kinerja keuangan daerah yaitu tingkat kekayaan daerah (*wealth*) yang merupakan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Tingkat kekayaan daerah (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Adapun pertimbangan dari tingkat kekayaan yang diukur dengan pendapatan asli daerah dikarenakan menjadi satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari sumber daya pada pemerintah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam

membiyai pembangunan daerah berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat.

Indikator kedua yang dapat menggambarkan kinerja fiskal atau kinerja keuangan daerah yaitu tingkat ketergantungan dengan pusat. Salah satu yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dengan pusat adalah seberapa besar dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya dana perimbangan dikarenakan memiliki peran yang dominan dibandingkan dana lainnya guna mempercepat pembangunan (Jauhar, 2016). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya menegaskan masalah transparansi dalam hal pemerintahan daerah, pemilihan aparatur pemerintahan, dan pelaporan keuangan, tetapi juga menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.

Indikator ketiga yang merupakan salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah yang merupakan salah satu analisis yang dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi berarti memiliki kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengelola potensi daerah menjadi sumber pendapatannya. Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan dan aktifitas pemerintah berarti diperoleh secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemandirian daerah dapat memberikan indikasi berkurangnya ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani *et al.*, 2016). Upaya suatu daerah dengan menekankan hasil pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain PAD yang sah perlu untuk terus diupayakan guna mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah serta mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah (Budianto dan Alexander, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya terfokus hanya pada pengaruh pendapatan daerah yang diprosikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi

umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Joice dan Lukfiah, 2018). Hasil ini memberi simpulan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda, berbeda dengan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Sedangkan hasil pengujian simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. PAD dalam penelitian diatas sebagai tingkat kekayaan dalam penelitian ini dan DAU sebagai tingkat ketergantungan kepada pusat.

Selanjutnya hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Priyono *et al.*, (2018) menyatakan bahwa ukuran Pemda, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, hanya kekayaan daerah dan jumlah penduduk secara parsial yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel ukuran Pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Nasution (2019) yang memiliki kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono *et al.*, (2018) dengan kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menyambung penelitian yang dilakukan oleh Priyono *et al.*, (2018), Harahap dan Nasution (2019) , serta Joice dan Lukfiah (2018) untuk menguji manakah penelitian yang tepat dengan menggunakan variabel independen yaitu kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap variabel dependen yaitu kinerja fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Tahun Anggaran 2010 - 2020)”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi?
2. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi?
3. Apakah kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi?
4. Apakah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan kemandirian keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah Kota Bekasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh dari kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah Kota Bekasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan serta pertimbangan mengenai kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan kemandirian keuangan daerah untuk dapat memperbaiki kinerja fiskal daerah Kota Bekasi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, dapat menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada variabel karakteristik pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah.